

ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SUMBAWA

Elly Karmeli¹, Wahyu Haryadi², Indah Ade Puji Astuti³

1. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

2. *Manajemen, Universitas Samawa*

3. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

Email :

ellykarmeli@universitas-samawa.ac.id,

wahyuharyadi@universitas-samawa.ac.id,

ABSTRACT

The purpose of this study was to know the effect of regional taxes, retribution, the results of separated regional wealth management and other legitimate local revenue toward the realization of own source revenue (PAD) of Sumbawa Regency in 2012-2018. The method used was multiple linear regression test, t-test, f-test and coefficient of determination (R^2). The conclusion of study stated that the independent variables, namely local taxes, local levies, the results of separated regional wealth management and other legal local revenue were able to explain the realization of own source revenue of 1000 or 100%, if seen from the f test on the ANOVAb table simultaneously, the independent variable did not had effect and was significant toward original regional income because the value of F-value was lower than F-table or ($1.423 < 19.25$) with the Sig. 000. While partially only regional taxes and the results of regional wealth management were separated which had a significant effect, meanwhile, the other two variables, namely regional retribution and others, had less significant effect toward the regional original income of Sumbawa

Keywords: *Own source revenue, Local Taxes, Regional Retribution, The results of Separated Regional Wealth Management, Other Legitimate Local Revenue.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari sumber daya daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomis bagi daerah tersebut. Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah, disamping kedua hal tersebut sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya pendapatan asli daerah juga perlu di optimalkan agar dapat meningkatkan PAD. (Mentayani dkk dalam Dicki Andika Efendi, 2018). Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksanan dalam mengambil suatu

keputusan yang tepat agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah daerah.

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, pemungutan pajak dapat dilakukan menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung. Pajak bertujuan untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2014:1). Adapun penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa yaitu berasal dari beberapa sumber antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB P2, dan Pajak BPHTB.

Selain bersumber dari pajak daerah, pendapatan asli daerah juga dapat bersumber dari retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (Resmi, 2014:2). Dengan demikian, retribusi daerah juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Retribusi daerah diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dimana retribusi daerah memiliki beberapa sumber antara lain dari Retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus, dan retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan asli daerah juga dapat dipengaruhi oleh perusahaan daerah yang merupakan bentuk badan usaha yang layak untuk melaksanakan pengelolaan pasar dengan manajemen yang tepat dan profesional, mengingat perkembangan pasar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga untuk mewadahi perkembangan pasar dimaksud diperlukan sistem kerja yang berlaku bagi perusahaan, sedangkan tujuan normatif yang hendak dicapai meliputi peningkatan pendapatan, peningkatan usaha, dan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Selain penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan diatas, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensinya cukup tinggi dalam meningkatkan penerimaan daerah, yaitu penerimaan ini berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah yang di dapatkan dari luar kegiatan pemerintah daerah akan tetapi masih di anggap sah untuk menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di peroleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan BLUD (2015-2018), Dana Kapitasi JKN pada FKTP (2014-2018), Pendapatan dana BOS (2017), dan Pelayanan Cash Management System (CMS)(2018).

Dalam otonomi daerah sumber-sumber keuangan daerah/pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pada umumnya daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD-nya dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada APBD. Sumber utama pembangunan daerah harus dapat dibiayai dari PAD, sehingga daerah tidak tergantung dari subsidi pemerintah pusat. Dengan demikian daerah dapat dengan leluasa melakukan akselerasi pembangunan daerahnya tanpa beban pengaruh dari pemerintah pusat sesuai dengan makna dari otonomi daerah yaitu melakukan sendiri segala urusan pemerintahan diluar urusan yang masih ditangani oleh pemerintah pusat. Akan tetapi dari pendapatan asli daerah yang hanya berkontribusi sebesar 9% terhadap pendapatan daerah di tahun 2018 masih belum bisa dikatakan efektif dikarenakan dana perimbangan masih menjadi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 74%, sehingga pemerintah Kabupaten Sumbawa harus lebih menggali lagi potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang sudah peneliti paparkan sebelumnya diatas, sumber- sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Sumbawa meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat sumber pendapatan asli daerah tersebut perlu ditingkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas, serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu mengoptimalkan potensi yang ada serta terus menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang berpotensi memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa.

Dengan demikian pencapaian pendapatan asli daerah harus lebih ditingkatkan kembali baik dari sisi pemerintahan sebagai pihak pemungut maupun dari sisi masyarakat yang menjadi pihak yang di bebaskan. Berdasarkan keempat faktor-faktor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diharapkan mampu meningkatkan PAD Kabupaten Sumbawa secara maksimal, sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian hasil dari pendapatan asli daerah tersebut dapat memberi dampak positif atau baik khususnya bagi pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, yang dimana peneliti akan meneliti pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Maka peneliti

mengambil judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2012-2018.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Indra Rindu Datu K, 2012).

Hasil pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Pasal 6) menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu yang pertama adalah Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan belanja modal, dimana semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD-nya.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Sama seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan lain yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber mendapatkan dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara.
2. Sebagai alat pengukur (regulatory), yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak Kabupaten/Kota

Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak propinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak propinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. Sistem pengenaan pajak sebagai berikut:

a. Pajak Progresif

Sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.

b. Pajak Proporsional

Sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.

c. Pajak Regresif

Sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu: Pertama; Perusahaan asli daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri. Dan Kedua; Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya. Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud, pada dasarnya dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan, dengan mengutamakan pembangunan

daerah dengan memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan bagi ekonomi daerah.

Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Undang-undang No 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan yaitu:

- 1) bagian laba Perusahaan milik Daerah,
- 2) bagian laba lembaga keuangan Bank,
- 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank,
- 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Jenis Penelitian Asosiatif, yang dimana penelitian ini merupakan bentuk penelitian dengan menggunakan minimal dua variabel yang dihubungkan. Metode Asosiatif merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara satu variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan hipotesis (Sugiyono, 2009:67). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk menguji variabel (X) terhadap Variabel (Y) yang dimana dalam penelitian ini mencari hubungan sebab dan akibat dari Faktor yang mempengaruhi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012-2018.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu jenis data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya yaitu data Realisasi pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data Sekunder. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai referensi seperti Literature, Arsip, Dokumentasi dan berbagai data lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini data sekunder dalam penelitian ini yaitu: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa dari tahun 2012-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara mendasar dan benar. Adapun teknik

pengumpulan data yang akan digunakan yaitu : Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder untuk mencari data sekunder eksternal yang diperlukan peneliti dapat menggunakan daftar referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012), Studi pustaka adalah kajian teoritis, refrensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti.

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Menurut Sugiyono Pengertian Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2014:277) bahwa:“Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”. Menurut Sugiyono (2014:277) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Koefisien konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

X4 = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

ε = Error, variabel gangguan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, menurut Haerana (2017) yang mengatakan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Majene. Sedangkan secara persial Pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Majene. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Majene. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Majene. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap PAD kabupaten Majene. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana pada penelitian ini, secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara parsial, variabel bebas Pajak Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan variabel Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pendapatan asli daerah dikarenakan nilai $t_{Hitung} < t_{tabel}$. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Putriani (2016), dimana hasilnya yaitu Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten Sumbawa tahun 2012-2018. Dari uraian yang telah ada, maka dapat disimpulkan :

1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Sumbawa. Dimana setiap realisasi pajak daerah bertambah maka akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Variabel Retribusi Daerah tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, jika terjadi peningkatan pada realisasi retribusi daerah maka tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dimana ketika realisasi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini bertambah maka telah memberikan pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dimana apabila realisasinya meningkatpun tidak terlalu memberikan pengaruh yang berarti terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Sumbawa.
5. Variabel bebas secara simultan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

REKOMENDASI

1. Kepada aparaturnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa agar lebih mengoptimalkan potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan terus menggenjot penerimaan apa saja yang mempunyai potensi meningkatkan PAD.

2. Kepada masyarakat, instansi, lembaga bisnis atau pun wajib pajak yang lainnya agar mempunyai kesadaran dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa melampaui jatuh tempo pembayaran, sehingga dapat meminimalkan penurunan PAD.
3. Kepada Pemerintahan terkait agar lebih banyak Melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, Nita Dwi. 2015 *Pengaruh Good Corporate Governance dan Earning Power Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta CGPI yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Ardhani, Pungky. 2011 *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi (dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pendapatan Kabupaten Sumbawa (2018), *Target dan Realisasi Pendapan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018..*
- Badan Pusat Statistik (2020), *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2020*
- Datu K, Indra Rindu. (2012). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Efendi, Dicki Andika, (2018). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Gujarati, D.N. 2012, *Dasar-dasar Ekonometrika*. Terjemahan Mangunsong, R.C. Salemba Empat, Buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Haerana, 2017. *Determinan Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majane*. Makassar : Universitas Negeri Makassar
- Laksmi, Devi Nanditya. 2016. *Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Realisasi PAD Tahun Anggaran 2006-2015 Kota Magelang*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen 2019*. Universitas Samawa.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 8 No 2, Agustus 2020

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018

Putriani, Eka.2016. *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bulukumba*.Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Utami, Rindy Rianti. *Jurnal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya Terhadap Belanja Modal*.Universitas Komputer Indonesia.Pada Jurnal (jbptunikompp-gdl-rindyriant-35491-10-unikom_r-I) di unduh pada 7 Februari 2020.